

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh daerah otonom, diterjemahkan sebagai definisi dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat daerah maka penting untuk dilaksanakannya desentralisasi fiskal. Penyelenggaraan desentralisasi terkait dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya adalah pembentukan daerah yang semakin efektif dan efisien dalam mengatur proses pengelolaan masing-masing. Oleh sebab itu pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan informasi dalam laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas keuangan yang didalam laporan keuangan terdiri dari ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Effendi (2020:14) “Dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi akrual penuh tidak lagi *cash towards accrual* selambat-lambatnya tahun 2015”. Terdapat karakteristik yang merupakan persyaratan normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu Relevan, memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat predikat, tepat waktu, lengkap, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material maupun tidak material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya.

Laporan keuangan merupakan alat pengendalian, evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah harus mengandung informasi yang bermanfaat karena laporan keuangan tersebut akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas, maka harus diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapatkan penilaian yang berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Hal ini dapat diartikan bahwa dari hasil data tersebut kinerja yang dilakukan sudah sangat baik dan transparan serta laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah Kota Palembang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Data hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1 LKPD Kota Palembang**

No.	Tahun Anggaran	Opini yang diperoleh dari BPK
1.	2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10.	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
11.	2022	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

*Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI, Tahun Anggaran 2012-2022*

Pencapaian opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut dapat menjadi inspirasi dan tekad bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Palembang. Dikutip dari berita [www.rmolsumsel.id/opini-wtp-12-kali-berturut-jadi-kamufalse-sistem-penganggaran-yang-kusut-bagian-pertama](http://www.rmolsumsel.id/opini-wtp-12-kali-berturut-jadi-kamufalse-sistem-penganggaran-yang-kusut-bagian-pertama) Prestasi yang didapatkan semakin memotivasi semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Palembang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelaporan keuangan lebih baik, akuntabel dan transparan, sesuai prinsip-prinsip laporan keuangan. Namun, opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan tersebut bukan berarti bebas dari kesalahan dan kekurangan. BPK mengungkapkan temuan potensi kerugian negara yang mencapai Rp15 Miliar dan menemukan modus berulang yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), setidaknya selama tiga tahun kebelakang. Meski demikian, wakil ketua BPK menyebutkan dampak permasalahan tersebut tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah baik namun masih harus ditingkatkan, agar kualitas akan informasi laporan keuangan yang dihasilkan bermanfaat dan lebih akurat terutama pada bagian pengelolaan keuangan daerah.

Meningkatkan kualitas laporan keuangan terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan salah satunya yaitu komitmen organisasi. Dengan komitmen organisasi yang tinggi maka akan meningkatkan kesadaran pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan berkualitas dan dapat menilai kinerja aparatur pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Komitmen organisasi adalah kuatnya pengakuan dan keterlibatan individu dalam organisasi tertentu atau sejauh mana karyawan mengidentifikasi dengan organisasi dan keterlibatannya dalam organisasi tertentu. Membangun komitmen dalam organisasi diperlukan untuk mengembangkan dan memelihara informasi akuntansi dalam bagian integral dari pelayanan dan pengambilan keputusan. Dengan adanya komitmen terhadap organisasinya, maka setiap pekerja akan mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasinya dan termotivasi melaporkan segala aktivitasnya termasuk dalam hal

penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian Veranika (2022) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain Komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengelolaan keuangan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama karena ketidakseragaman format laporan keuangan dan kemungkinan tingkat kesalahan penyajian laporan keuangan lebih tinggi. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong setiap pemerintah daerah untuk ikut serta memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi menggunakan jaringan internet maupun jaringan intranet untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan untuk menyeragamkan laporan keuangan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil penelitian Gusdani (2023) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Faktor lain yang menunjang keandalan laporan keuangan yaitu Kompetensi Aparatur Pemerintah. Kompetensi Aparatur merupakan kemampuan seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi pemerintah yang dalam mengerjakan tugasnya dengan dilandasi keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mencapai tujuan berorganisasi. Kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur OPD dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. Hasil penelitian oleh Sintia (2022) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Dari hasil penjelasan yang berkaitan dengan Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. Maka itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Komitmen Organisasi secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang?
2. Apakah terdapat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang?
3. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang?
4. Apakah terdapat pengaruh Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar Penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya untuk Komitmen Organisasi, Pemahaman, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah. Objek Penelitian ini adalah Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Palembang untuk periode tahun 2023.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui:

1. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.
2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.
3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

4. Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar memberikan sumbangan pemikiran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Palembang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan.